

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

TEMBILAHAN KAB.INDRAGIRI HILIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Fakultas Ekonomi



OLEH:

HUSNA ZULFA

165310141

PROGRAM STUDI AKUNTANSI-S1

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH TEMBILAHAN KAB.INDRAGIRI HILIR

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada rumah sakit umum daerah tembilahan yaitu untuk mengetahui tingkat kesesuaian penerapan akuntansi pada perusahaan dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum.

Data yang di ambil adalah data primer dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan metode deskriptif.

Hasil yang diperoleh adalah pencatatan transaksi RSUD dengan menggunakan basis akrual. Perusahaan tidak mencatat penyusutan aset tetap dan perusahaan tidak mencatat kerugian atas persediaan obat yang kadaluwarsa. Dari kesimpulan dan hipotesis dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

kata kunci: Siklus akuntansi keuangan rumah sakit umum daerah dan pengelolaan rumah sakit umum daerah

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ACCOUNTING IN TEMBILAHAN HOSPITAL IN TEMBILAHAN DISTRICT, INDRAGIRI HILIR

Research conducted by the author at the general hospital in the Tembilahan area is to determine the level of suitability of accounting application in companies with generally accepted accounting principles.

The data taken is primary data with data collection techniques, namely interviews and documentation and data analysis techniques using descriptive methods.

The result obtained is the recording of RSUD transactions using an accrual basis. The company does not record depreciation of fixed assets and the company does not record losses on expired drug supplies. From the conclusions and hypotheses it can be concluded that the Tembilahan Regional General Hospital, Indragiri Hilir Regency is not in accordance with generally accepted accounting principles.

Keywords: *Financial accounting cycle of regional public hospitals and management of regional public hospital*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kepada ALLAH SWT, berkat rahmat dan karunianya terhadap penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada fakultas ekonomi jurusan akuntansi di Universitas Islam Riau.

Pada saat mengerjakan skripsi ini penulis banyak mendapatkan perhatian, bimbingan, dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak yang membantu penulis dalam melakukan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Syfrinaldi, Sh., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Firdaus AR.,SE.,M.Si.,Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dan Penasehat Akedemi penulis di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang banyak bersabar, mendengar, dan memberi dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibuk Siska S.E M.Si.,Ak,.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.Sekaligus dosen pembimbing saya yang selalu senantiasa menghadapi saya, terimakasih atas bimbingan dan waktunya.

4. Ibuk rini selaku sekretaris bendahara Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan yang sudah bersedia saya wawancara dan memberikan informasi terkait laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan.
5. Terimakasih banyak kepada bapak munir dan ibuk maryam selaku orang tua penulis yang selalu memberikan *support* dan doa yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada team keluarga munir kak irah, bangah, bg ai, kakina, bgtopik, dan kakwinda yang selalu mendengarkan curahan hati sang adik.
7. Terimakasih kepada lathifah, yunita, ecy, yola, teman yang selalu mendorong saya agar saya lebih maju, teman yang selalu mendengarkan curahan hati mengenai masalah kuliah sampai masalah skripsi.
8. Terimakasih kepada abdul hamid yang selalu ada buat penulis, yang menjadi *support system* penulis dan teman-teman lainnya yang didumai, yang selalu membawakan tawa ditengah masamnya kehidupan.
9. Terimakasih kepada sahabat sejati sejak tahun 2010 inung dan ipit, yang selalu ada dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Terimakasih kepada febby elza dan nurul azliana yang telah mengisi jam kosong penulis semasa kuliah.
11. Serta terimakasih saya kepada teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	8
2.1 Telaah Pustaka	8
2.1.1 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah	9
2.1.2 Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah	10
2.1.3 Sistem Pencatatan Dan Dasar pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah	11
2.1.4 Tujuan Dari Penyajian Pelaporan Keuangan Daerah	12
2.1.5 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah	13
2.1.6 Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah	13

2.1.7	Siklus Akuntansi Keuangan Daerah.....	15
2.1.8	Komponen-Komponen Laporan Keuangan Daerah.....	17
2.1.9	Akuntansi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri	17
2.1.10	Persamaan Dan Perubahan Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Akuntansi Perusahaan.....	18
2.1.11	Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013.....	22
2.1.12	Badan Layanan Umum.....	24
2.2	Hipotesis	30
BAB III	: METODE PENELITIAN	31
3.1	Desain Penelitian	31
3.2	Lokasi Penelitian	31
3.3	Jenis dan Sumber Data	31
3.4	Teknik Pengumpulan Data	32
3.5	Teknik Analisis Data	32
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1	Gambaran Umum	33
4.1.1	Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan	33
4.1.2	Aktivitas Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan	39
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	40
4.2.1	Dasar Pencatatan	40

4.2.2	Proses Akuntansi.....	40
a.	Tahap Pencatatan	41
b.	Posting Buku Besar	41
c.	Neraca Saldo	42
d.	Jurnal Penyusuaian	42
e.	Jurnal Penyusutan	43
f.	Pelaporan Keuangan.....	43
g.	Penyajian Laporan Keuangan	43
1)	Laporan Realisasi Anggaran	43
2)	Laporan Perubahan SAL	44
3)	Neraca.....	44
4)	Laporan Operasional	47
5)	Laporan Perubahan Ekuitas.....	48
6)	Laporan Arus Kas.....	48
7)	Catatan Atas Laporan Keuangan.....	48
BAB V	: KESIMPULAN dan SARAN.....	49
5.1	Kesimpulan	49
5.2	Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan peranan berarti untuk warga Indonesia, khususnya untuk warga tembilahan, kabupaten Indragiri Hilir. Demi menjamin kesehatan warga tersebut, hingga butuh diadakannya tempat ataupun wadah untuk mereka bila mempunyai keluhan menimpa kesehatan. Oleh karena itu pemerintah sediakan wadah tersebut di Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir.

Bersumber pada peraturan menteri keuangan Republik Indonesia no 220/PMK. 05/ 2016 menjelaskan Laporan Keuangan merupakan wujud pertanggung jawaban BLU berbentuk laporan realisasi anggaran, laporan pergantian saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan pergantian ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan merupakan wujud pertanggung jawaban BLU berbentuk laporan realisasi anggaran, laporan pergantian saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan pergantian ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.

Setiap instansi atau organisasi tidak ingin terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, oleh sebab itu perlu dilakukannya pencatatan akuntansi yang benar dan sesuai dengan yang berlaku

umum. Pencatatan akuntansi ini juga berguna agar terciptanya 3E (efektif,efisien,ekonomi) didalam instansi tersebut.

Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan melaksanakan proses akuntansi yang diawali dari melaksanakan(1) transaksi yang digunakan buat mendokumentasikan transaksi keuangan kedalam fakta transaksi serta melaksanakan analisis transaksi.(2) menjurnal transkasi yang menyebabkan penerimaan serta pengeluaran kas dicatat dalam harian spesial penerimaan kas, sebaliknya transaksi yang menimbulkan pengeluaran kas dicatat dalam harian spesial pengeluaran kas.(3) artikel kebuku besar transaksi ataupun ditaksir yang dicatat di novel harian. Rekening tersebut digunakan buat mencatat aktiva, kewajiban, serta ekuitas secara terpisah.(4) membuat neraca saldo, merupakan catatan saldo sedangkan account besar pada sesuatu dikala tertentu.(5) membuat harian penyesuaian catatan kondisi yang sesungguhnya pada akhir periode.(6) menyusun neraca saldo sehabis penyesuaian, merupakan neraca saldo yang disusun sehabis pembuatan harian penyesuaian.(7) membuat laporan keuangan, laporan ini menyajikan data yang bermanfaat buat mengambil keputusan oleh bermacam pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program serta aktivitas kemajuan realisasi pencapaian sasaran pemasukan, realisasi penyerapan belanja serta realisasi penyerapan pembiayaan.(8) harian penutup ialah yang dicoba sehabis laporan keuangan disusun, harian penutup umumnya dicoba pada akhir periode anggaran tahunan dengan metode menutup account pemasukan serta beban.

Akuntansi keuangan daerah ialah proses pengidentifikasian, analisis transaksi, pencatatan serta pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah wilayah yang dijadikan bagaikan data dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak dari lembaga pemerintah yang bertujuan buat mengendalikan serta melindungi kekayaan ataupun aset kepunyaan lembaga yang bersangkutan. Gunanya mengendalikan keuangan dalam suatu lembaga pemerintah wilayah yang umumnya dipegang oleh satuan pemegang kas yang terdiri dari satu pemegang kas serta sebagian orang pembantu pemegang kas dengan tugas serta guna yang berbeda-beda(Rahdinata; 2017).

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun guna memberikan informasi mengenai transaksi-transaksi yang terjadi di instansi tersebut. Dan juga berguna untuk membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dan anggaran yang telah terjadi, dan untuk mengontrol agar instansi tersebut selalu menerapkan 3E (ekonomi, eektif, efisien)

Rumah Sakit Umum Daerahh Tembilahan Kabupaten Indragirihilir melaksanakan pencatatan akuntansi bersumber pada pada peraturan menteri dalam Negri No 64 Tahun 2013. Dimana pedoman pengelolaan keuangan wilayah tersebut dengan melaksanakan pencatatan serta penggolongan ke buku harian yang berisi tentang penerimaan kas, pengeluaran kas, serta fakta memorial. Berikutnya diposting ke buku besar yang berisi akun-akun berikutnya melaksanakan pelaporan antara lain Laporan Realisasi Anggaran, laporan pergantian saldo anggaran lebih, neraca,

laporan operasional, laporan arus kas, laporan pergantian ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.

pencatatan yang dilakukan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan Kabupaten Indra Girihilir menggunakan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran. Dimana melakukannya dengan menyandingkan pendapatan dan biaya pada periode disaat terjadinya

Rumah Sakit Umum Daerah untuk menjalankan kegiatannya tentu menggunakan aset lancar dan aset tetap. Persediaan merupakan aset lancar yang dimiliki perusahaan dan digunakan dalam kurun waktu kurang dari satu periode. Sistem pencatatan persediaan yang dilakukan RSUD menggunakan sistem perpetual, dimana nilai persediaan setiap barang yang keluar atau masuk dicatat sesuai dengan waktu terjadinya. Metode yang digunakan ialah metode FIFO (First In First Out) yaitu barang yang dibeli pertama akan dijual atau dipakai pertama kali juga, barang yang dijual atau dipakai dihitung berdasarkan harga pokok barang tersebut.

Berbeda dengan buku persediaan obat-obatan, dicatat menggunakan sistem periodik, dimana persediaan dihitung pada akhir periode. Namun pada pencatatannya, persediaan obat-obatan dirumah sakit tidak menghitung nilai persediaan per unitnya. Melalui sesi wawancara ke pihak rumah sakit umum daerah tembilahan, obat yang telah expired diletakkan digudang dan akan dibuang pada akhir periode. Namun pihak rumah sakit tersebut tidak mencatat kerugian persediaan atas persediaan yang expired.

Aset tetap ialah aset berwujud yang digunakan untuk pengoperasian suatu usaha atau organisasi untuk digunakan selama lebih dari satu tahun. Dalam daftar aset yang tersedia, rumah sakit umum daerah ini tidak melaporkan penyusutan yang terjadi disetiap aset hanya melaporkan kondisi aset tersebut apakah baik, kurang baik, atau rusak berat. Kemudian aset yang tertera rusak berat sudah tidak digunakan lagi dan disimpan digudang tetapi masih dimunculkan kedalam pada daftar aset. pada pencatatan aset tetap dalam laporan neraca rumah sakit umum daerah tembilahan hanya mengelompokkan jenis aset.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan suatu masalah bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi pada Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PP 64 Tahun 20113 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

1.4. Manfaat penelitian

a. Bagi RSUD kabupaten Indragiri Hilir

Sebagai bahan pertimbangan, masukan dalam penerapan akuntansi yang dapat memberikan data yang handal sebagai dasar pengambilan keputusan.

b. Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama mengikuti perkuliahan serta menambah pengalaman dibidang akuntansi pada Rumah Sakit.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Memberikan sumbangan ilmiah bagi mahasiswa/I dan institusi pendidikan mengenai Penerapan Akuntansi pada Rumah Sakit.

1.5 Sistematika penulisan

Bertujuan untuk dapat memberikan pemaahaman tentang penulisan ini, maka sistematika penulisan ini membagi 5 bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini terlebih dahulu saya mengemukakan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II: Telaah Pustaka Dan Hipotesis

Bab ini berisi tentang telaah pustaka yang membahas mengenai pengertian serta hipotesis yang digunakan dalam skripsi ini.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian yang ditetapkan guna mencapai tujuan penelitian yaitu terdiri dari lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data

BAB IV :Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi dan aktivitas perusahaan. Serta membahas mengenai siklus akuntansi, penyusutan aset tetap, dan kebijakan perusahaan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang berhubungan dengan apa yang dibahas.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Samryn (2011:4) akuntansi adalah:

Suatu informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengomunikasikan, peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi sebagai pemakai.

Menurut Agus (2010:10) System akuntansi yang menghasilkan laporn kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Menurut Ulum (2010:5) akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif satu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Halim (2001:5) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang enititas ekonomi yang dimaksud agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabanag antara lain, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan mencatat, mnggolongkan.Pengikhtisaran, tranaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan.

2.1.2 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak dari instansi instansi pemerintah yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi kekayaan atau asset milik instansi yang bersangkutan. Fungsinya mengatur keuangan dalam sebuah instansi pemerintah daerah yang biasanya dipegang oleh satuan pemegang kas yang terdiri dari satu pemegang kas dan beberapa orang pembantu pemegang kas dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda (Rahdinata 2017).

Menurut Tanjung (2017:35) akuntansi keuangan daerah adalah dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian umumnya bersifat keuangan dan termasuk dalam pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kestatuan Republik Indonesia.

2.1.3 Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah

Tujuan akuntansi keuangan daerah, menurut Tanjung (2010:9) yaitu:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasiknya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan kegiatan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya. Baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dari pungutan pajak dan pinjaman.

Dari tujuan-tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi daerah sebagai penyedia informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi, dan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan entitas pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.

2.1.4 Sistem pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

- a. Sistem pencatatan

Pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktifitas yang berhubungan dengan uang. Pengukuran transaksi ekonomi adalah menggunakan satuan uang, oleh

karna itu semua transaksi akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Pencatatan transaksi ekonomi yaitu pengelolaan data transaksi tersebut melalui penambahan atau pengurangan oleh sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi harus menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi.

Menurut Halim (2012:44) ada beberapa macam pencatatan yang digunakan diantaranya:

1. *Single entry* yaitu setiap pencatatan ekonomi dilakukan dengan mencatatnya sebanyak satu kali. Transaksi yang berakibat bertambah kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.
2. *Double entry* pencatatan dengan system ini ada sisi debit dan kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan dasar akuntansi
3. *Triple entry* system pencatatan ini adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara pencatatan *double entry* dijalankan, sub bagian pembukuan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan efektif pada sisi anggaran.

b. Dasar pengakuan akuntansi keuangan daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2012:5-55) dasar akuntansi sebagai empat yaitu:

- 1) *Basis cash*

Basis kas seperti telah diuraikan sebelumnya menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan kas, maka perubahan tersebut tidak dicatat.

2) Basis akrual

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa itu terjadi dan bukan hanya saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Oleh karena itu transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan dikui dalam laporan keuangan pada periode yang terjadi.

3) Basis kas modifikasi

Mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4) Basis akrual modifikasi

Mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian transaksi.

2.1.5 Tujuan dari Penyajian Pelaporan Keuangan Daerah

Tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah adalah:

- a. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintah.

- b. Memberikan akuntansi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.
- c. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memonitor kinerja, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati dan ketentuan lain yang disyaratkan.
- d. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dalam pembelajaran sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
- e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Dari tujuan pelaporan keuangan daerah diatas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dapat memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah, memberikan informasi untuk perencanaan anggaran, serta dapat mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi dalam satuan untuk pemerintah.

2.1.6 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

(Rahdinata 2017) mengungkapkan bahwa:

Akuntansi terdiri dari tiga bidang utama, yakni akuntansi komersial, akuntansi perusahaan, dan akuntansi social. Dalam akuntansi komersial, data yang digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen,

pemilik modal, penanam modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut. Dalam akuntansi pemerintah, data digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislative, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi social merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian mikro, yang melayani perekonomian nasional. Sebagai contoh adalah neraca pembayaran Negara, transaksi arus dana, transaksi pendapatan dan produksi nasional, serta neraca nasional.

Lingkup akuntansi pemerintah:

1. Akuntansi pemerintah pusat
2. Akuntansi pemerintah daerah
 - Akuntansi pemerintah provinsi
 - Akuntansi pemerintah kabupaten/kota.

2.1.7 Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah

a. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Adalah badan yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah.

b. Badan Pengawas Keuangan

Adalah badan yang mengawas atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pemerintah daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah: inspektorat jenderal dan badan pemeriksa keuangan.

c. Investor, Kreditor, Dan Donatur

Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun yang lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bai pemerintah daerah.

d. Pemerintah Pusat

Memerlukan laporan keuangan untuk menilai pertanggung jawaban gubernur sebagai wakil pemerintah.

e. Pemerintah Daerah

Saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.

2.1.8 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

a. Transaksi

Transaksi merupakan kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya dengan buku/bukti/dokumen pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas.

b. Bukti Transaksi

suatu bukti yang tertulis atau bukti bukti ats terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau bisnis.

c. Analisi transaksi

Menganalisa ransaksi keuangan yang menyebabkan perubahan terhadap aktiva, hutang, modal. Misalnya,pemerintah daerah mengeluarkan kas untuk membayar beban sewa garasi.

d. Jurnal Transaksi

Media untuk mencatat transaksi secara kronologi(berturut). Digunakan untuk menjurnal jurnal financial, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup seentara jurnal anggaran dicatat pada buku anggaran.

e. Posting ke Buku Besar

Setelah dilakukan jurnal kemudin jumlah yang terdapat pada sisi debit dan kredit dipindhkan/transfer ke rekening buku besar yang sesuai.tindakan transfer ini disebut *posting*. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening, bertujuan mencatat secara terpisah atas pendapatan, belanja, pembiayaan,aktiva,hutang dan ekuitas dana.

f. Buku Besar Pembantu

Digunakan untuk mencatat rincian rekening tertentu yang ada dibuku besar.Rekening buku besar yang rinciannya dicatat dalam buku pembantu disebut rekening pengawas sedangkan rekening yang merinci rekening pengawas disebut rekening pembantu (*subsidiary accounts*).Contoh buku pembantu adalah buku pемbanatu piutang, buku pembantu persediaan, dan sebagainya.

g. Neraca Saldo

Neraca saldo merupakan daftar rekening rekening beserta saldo yang menyertainya pada suatu periode tertentu. Menurut sofyan Safry Harahap neraca adalah posisi keuangan yang menggambarkan posisi keuangan dalam suatu tanggal tertentu atau *a moment of time*

h. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian perlu dibuat karena akuntansi dikenal prosedur penyesuaian. Prosedur penyesuaian perlu dilakukan karena akuntansi didasari asumsi bahwa suatu umur entitas ekonomi dapat dipanggal menjadi periode-periode yang sifatnya buatan. Asumsi ini disebut asumsi periodisasi yang mengharuskan kita untuk membuat jurnal penyesuaian.

i. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

untuk menihilkan rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan digunakan rumus sebagai berikut:

- a. Karena pendapatan terletak pada posisi kredit maka untuk menihilkannya harus didebit, demikian halnya penerimaan pembiayaan.
- b. Karena belanja terletak disisi debit maka untuk menihilkannya harus dikredit, demikian halnya pengeluaran pembiayaan.
- c. Selisih antara pendapatan, penerimaan pembiayaan, belanja dan pengeluaran pembiayaan merupakan silpa.

2.1.9 Komponen-Komponen Laporan Keuangan Daerah

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi keuangan adalah laporan yang menyajikan posisi aktiva, hutang, dan modal pemilik yang disajikan pada akhir periode.

b. Laporan Kinerja Keuangan

Laporan kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan melakukan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

c. Laporan Perubahan Dalam Aktiva

Laporan perubahan dalam aktiva adalah penggambaran peningkatan atau penurunan kekayaan. Berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran arus kas masuk dan keluar.

e. Kebijakan Akuntansi Dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Ada banyak pertimbangan oleh suatu entitas untuk disajikan dalam laporan keuangan daerah. Dalam catatan atas laporan keuangan dari entitas wajib menyajikan informasi mengenai yang tidak disajikan pada laporan keuangan namun persyaratan penyajian wajar tetap diterapkan.

2.1.10 Sistem Akuntansi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Sistem akuntansi keuangan daerah menurut pemendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 22 ayat 3 merupakan serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atau transaksi dan atau kejadian

keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer.

Menurut peraturan menteri dalam negeri menurut nomor 13 tahun 2006, dalam rangka pertanggungjawaban APBD, entitas pelaporan penyusunan laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu: prosedur akuntansi pemerintah kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas dan prosedur akuntansi selain aset

- a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses baik manual terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran, atas transaksi, dan kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan atau SKPKD, prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi:

1. Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD. Sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPD
2. Fungsi pada PPK-SKPD berdasarkan fungsi transaksi penerimaan kas mencatat ke dalam buku jurnal penerimaan kas, disertai rekening-lawan asal penerimaan kas tersebut.
3. Bukti transaksi penerimaan kas mencakup antara lain:
 - a. Surat tanda bukti pembayaran
 - b. Surat tanda setoran
 - c. Bukti transfe
 - d. Nota kredit
 - e. Buku penerimaan lainnya
4. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan atau fungsi akuntansi pada SKPD secara periodic atau berkala melakukan posting kedalam buku besar.
5. Jika dianggap perlu fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan atau fungsi akuntansi pada SKPD dapat membuat buku besar pembantu yang berfungsi sebagai rincian dan control buku besar.
6. Pencatatan dalam penerimaan kas, buku besar dan buku pembantu dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan atau fungsi akuntansi pada SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

7. Pada akhir periode, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan atau fungsi akuntansi pada SKPD menyusun laporan keuangan

b. **Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas**

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai pencatatan pengikhtisaran atas transaksi maupun kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan atau SKPKD.

c. **Prosedur Akuntansi Selain Kas**

Prosedur akuntansi selain kas adalah meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan atau kejadian selain kas pada SKPD dan atau SKPKD.

d. **Prosedur Akuntansi Aset**

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian aset, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindahan tangan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai atau digunakan SKPD dan atau SKPKD. Prosedur akuntansi aset digunakan

untuk alat pengendali dalam pengelolaan asset yang dikuasai atau digunakan SKPD dan atau SKPKD.

2.1.11 Persamaan Dan Perubahan Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Akuntansi Perusahaan

a. Persamaan Akuntansi Pemerintah Dengan Akuntansi Komersial

Menurut (IlhayuL 2016) persamaan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi komersial, yaitu:

1. Akuntansi pemerintah maupun akuntansi komersial sama-sama memberikan informasi mengenai posisi keunagan dan hasil operasi.
2. Akuntansi pemerintah maupun akuntansi komersial mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum.
3. Keduanya merupakan bagian dari integral system ekonomi disuatu Negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
4. Kedua sektor terikat pada peraturan perundang undangan dan ketentuan hokum lain yang diisyaratkan.

Jadi dapat disimpulkan persamaan akuntansi keuangna daerah dengan akuntansi perusahaan yaitu sama-sama memberikan informasi keuangan yang bertumpu pada standar akuntansi yang diterima secara umum, kkeduanya sama-sama membutuhkan

informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.

b. Perbedaan Antara Akuntansi Pemerintah Dengan Akuntansi Komersial

Menurut Ilhayul Ulum Md persamaan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi komersial, yaitu:

1. Perbedaan dapat dilihat terutama dari segi kegiatan dan tujuan dari perusahaan komersial dengan organisasi pemerintah, pada perusahaan komersial, kegiatannya adalah menghasilkan keuntungan, sedangkan pemerintah adalah pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam akuntansi pemerintah terdapat perkiraan anggaran, sedangkan akuntansi komersial tidak terdapat.
3. Akuntansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan pemerintah sehingga bersifat lebih kaku. Dibandingkan dengan akuntansi komersial.

Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi perusahaan bertujuan untuk mencari laba profit sedangkan akuntansi pemerintah berfokus pada pelayanan kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak memungkinkan tidak mendapatkan laba.

2.1.12 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

Peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2013, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengikhtisaran, pengikhtisaran keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasikan atas hasilnya. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusutan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, penyusunan laporan keuangan dalam pemecah atas sesuatu, masalah yang belum diatur dalam rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

2.1.13 Badan Layanan Umum

Badan layanan umum adalah instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan laba dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Secara umum badan atas layanan umum adalah pelayanan yang pengelolaannya berdasarkan keuangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya.

- a. Asas BLU lainnya adalah:
 1. Pejabat BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada pimpinan instansi tersebut.
 2. BLU tidak mencari laba

3. Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dan instansi induk tidak terpisah.
 4. Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat
- b. Persyaratan menjadi BLU yaitu:
- Persyaratan substansif BLU, fungsi dasar pelayan public, memperoleh imbalan atas seluruh/sebagian layanan berupa barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat. Harus berorientasi pada layanan public/masyarakat .oleh karenanya BLU tidak mengutamakan mencari keuntungan.
- c. Karakteristik BLU
1. Berkedudukan sebagai instansi pemerintah (bukan kekayaan Negara yang dipisahkan).
 2. Menghasilkan barabf/jasa yang seluruhnya atau sebagian dijual kepada public.
 3. Tidak bertujuan mencari keuntungan.
 4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisien dan produktivitas ala korporasi.
 5. Rencana kerja, anggaran, dan pertanggung jawaban dikonsilidasikan kepada instansi induk

2.1.1 Kebijakan Akuntansi Yang Penting

1. Dasar penyusunan Laporan keuangan
 - a. Laporan keuangan yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun atas dasar akrual dengan konsep biaya historis

- b. Laporan arus kas disusun atas dasar kas dengan metode langsung. BLU memperhitungkan deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya sebagai setara kas.
 - c. Periode akuntansi BLU adalah mulai 1 januari sampai dengan 31 desember tahun yang bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.
2. Pengakuan Pendapatan Dan Beban
 - a. Sumbangan dari pihak lain diluar pemerintah dan subsidi pemerintah diakui berdasarkan penerimaan kas atau asset non kas,
 - b. Pendapatan dari APBN dicatat sebesar nilai realisasi belanja APBN,
 - c. Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar saat perolehan.
 3. Pemakaian persediaan dicatat berasarkan metode rata-rata tertimbang
 4. Nilai persediaan akhir dihitung dengan menggunakan rumus harga terakhir
 5. Selisih nilai persediaan akhir dengan saldo pencatatan berdasarkan pemakaian persediaan, dicatat sebagai keuntungan/kerugian nilai persediaan.
 6. Investasi terdiri dari investasi lancer dan investasi jangka panjang. Deposito berjangka yang jatuhnya tiga bulan sampai dengan satu tahun pada saat penempatan disajikan sebagai investasi lancer.
 7. Asset Tetap
 - a. Asset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan dan taksiran masa manfaat atas

perolehan aset tetap diatur sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 01/pmk.06/2013 tentang penyusutan barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada entitas pemerintah pusat dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/KMK.06/2013 mengenai table masa manfaat daam rangkapenyusutan brang milik Negara berupa set tetap pada entitas pmerintah pusat.

- b. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memenuhi syarat berikut ini:
- 1) Syarat kualitati yaitu:
 - Memperpanjang masa manfaat
 - Meningkatkan kapasitas volume
 - Meningkatkan standarkinrja/kualitas
 - 2) Syarat kuantitatif kapitalisasi biaya pemeliharaan mengacu pada peraturan mentri keuangan yang berlaku.
- c. Terhadap aset yang mempunyai komponen yang harus diganti dengan nilai yang material, maka penggantian bagian tertentu aset tetap diperllakukan sebagai berikut:
- i. Nilai tercatat bagian yang diganti dihentikan pengakuannya
 - ii. Nilai perolehan bagian yang menggantikan ditambah kenilai tercatat aset tetap

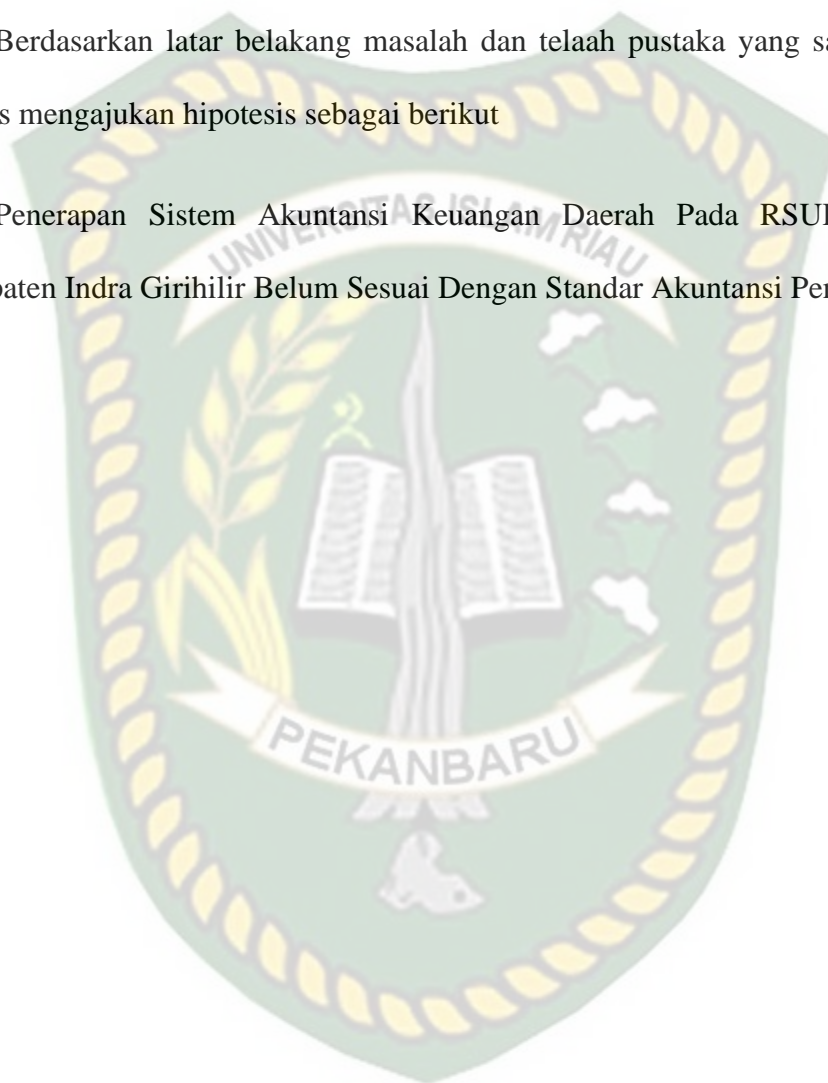
- d. Hak atas tanah dikapitalisasi senilai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hak tersebut. Selanjutnya hak atas tanah diamortasi sesuai dengan masa manfaatnya berdasarkan surat perizinan.
8. Sewa:
- a. Transaksi sewa dikelompokkan sebagai *capital lease* apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - i. Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli asset yang disewa pada akhir masa sewa dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulinya sewa.
 - ii. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa dapat menutup pengembalian biaya perolehan barang modal yang disewa beserta bunyanya sebagai keuntungan perusahaan sewa.
 - iii. Masa sewa minimal dua tahun.
9. Aset tidak berwujud harus memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. Dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik
 - b. Adanya pengendalian sumber daya
 - c. Adanya masa manfaat dimasa depan
10. Aset tidak berwujud berkurang pada saat diamortisasi sebesar jumlah alokasi yang sistematis.
11. Jumlah alokasi yang sistematis tersebut diakui sebagai beban amortisasi pada saat terjadinya.

12. Masa manfaat asset tidak berwujud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Software masa manfaat 5 tahun
 - b. Paten masa manfaat 20 tahun jika paten tersebut terkait dengan pembarua, inventif, dan dapat diterapkan dalam industry, sedangkan paten sderhana yang terkait dengan kebaruan, tidak inventif, dan tidak dapat diterapkan dalam industry manfaat 10 tahun
 - c. Hak cipta masa manfaat 50 tahun semenjak diumumkan.
 - d. Franchise masa manfaat sesuai dengan perjnajian dengan pemberi franchise
13. Asset tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat tak terbatas, idak diamortisasi.
14. Pengeluaran setelah perolehan awal asset tidak berwujud dikapitalisasi menambah nilai asset tidak berwujud jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Syarat kualitatif
 - Memperpanjang masa manfaat
 - Meningkatkan standar kinerja
 - b. Syarat kuantitatif kapitalisasi biaya pemeliharaan mengacu pada peraturan menteri keuangan yang berlaku. Dalam hal belum terdapat peraturan menteri keuangan mengenai kapitalisasi asset tidak berwujud adalah sebesar Rp. 20.000.000

2.1. HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang saa bahas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada RSUD Tembilahan Kabupaten Indra Girihilir Belum Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, untuk mendapatkan informasi dengan cara mengumpulkan data-data yang akan diteliti dan mewawancarai kepada pihak-pihak yang bersangkutan di. Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan dasar ingin melihat penerapan akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang diambil yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan Kabupaten Indra Girihilir lalu kemudian diolah dan disusun kembali oleh penyusun pencatatan keuangan daerah, proses pelaksanaan daerah, proses pengawasan keuangan daerah, proses pengesahan perhitungana keuangan daerah.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan Kabupaten Indra Girihilir dalam bentuk jadi, misalnya sejarah

singkat pemerintahan Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan Kabupaten Indra Girihilir, struktur organisasi, serta laporan keuangan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode:

1. Wawancara yang dilakukan bersama bagian keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan Kabupaten Indra Girihilir.

2. Teknik dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan mempelajari literature-literatur baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, surat edaran dan buku-buku yang berhubungan dengan pennisan skripsi.

3. Teknik Analisa Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan membandingkan antara praktek dengan teori yang ada, kemudian disajikan dalam bentuk sebuah penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data penulis menggunakan metode deksriptif dengan cara menganalisis dan membandingkan antara data yang telah dikumpul dengan teori relevan yang berkaitan dengan pembahasan untuk memecahkan permasalahan, kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan

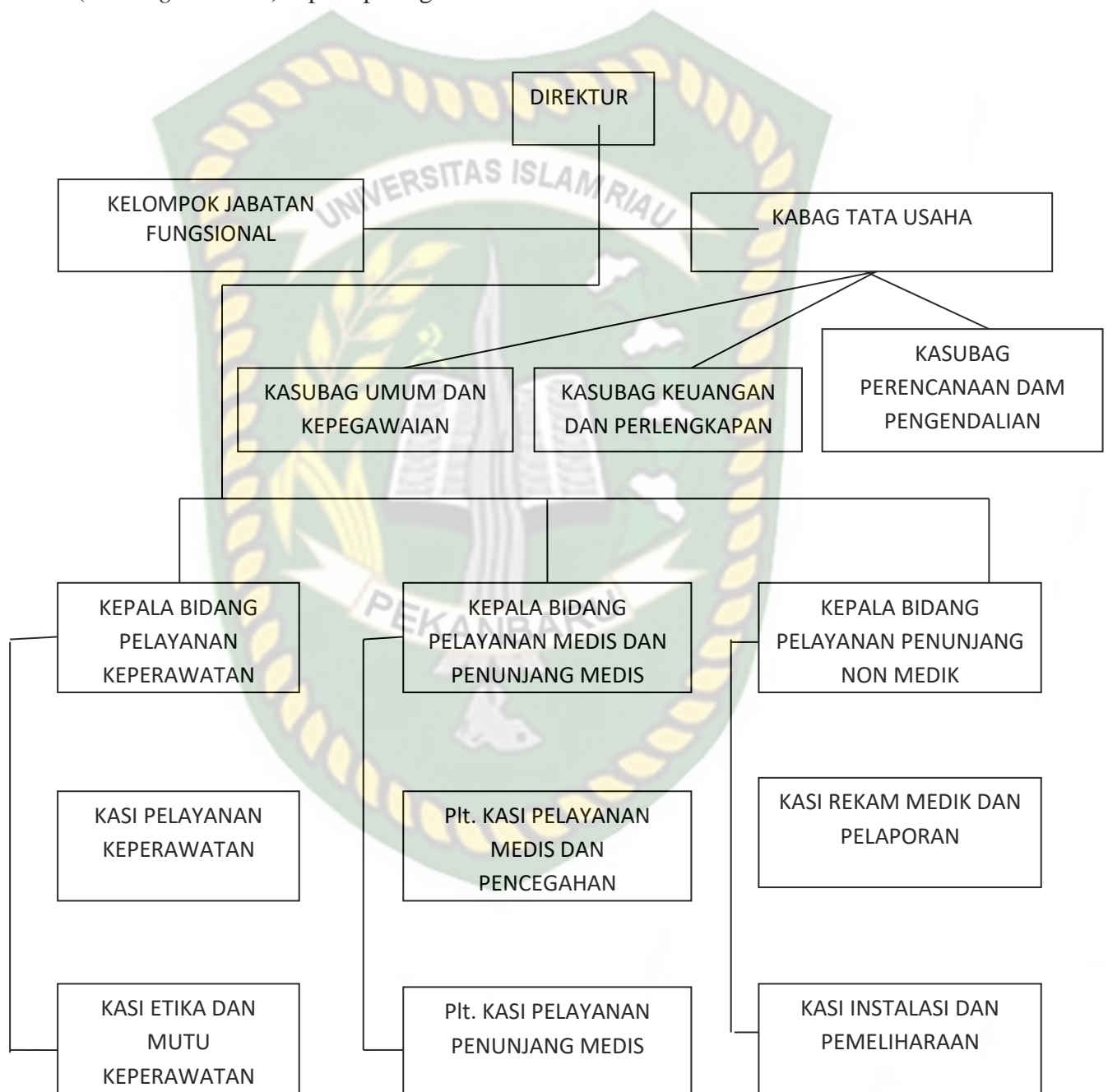
Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang kesehatan. RSUD ini merupakan organisasi nirlaba yaitu tujuan utama dari organisasi ini melayani masyarakat bukan untuk mencapai laba, tapi bukan berarti tidak bisa mendapatkan laba. RSUD ini didirikan pada tahun 1981.

4.1.1. Struktur Prganisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan

Organisasi merupakan sesuatu tubuh/ kelompok yang ada anggota- anggota yang mempunyai tujuan yang sama. Buat menggapai sesuatu tujuan yang diresmikan hingga anggota organisasi wajib bekerja dalam ketentuan, yang hendak membuat anggota mengenali tugas serta tanggungjawab dan kepada siapa wajib di pertanggung jawab.

Organisasi wajib mempunyai struktur organisasi yang bisa jadi sesuatu cerminan ikatan kerja antara anggota di dalam sesuatu organisasi. Di dalam industri buat menggapai tujuan serta aktivitas pembedahan industri yang berjalan dengan baik haruslah mempunyai struktur organisasi yang bisa menggambarkan posisi, wewenang, kewajiban, tanggungjawab dan ikatan antara bagian dalam industri.

Berdasarkan penelitian pada rumah sakit umum daerah tembilahan kabupaten Indragiri hilir memiliki struktur organisasi yang berbentuk standar organisasi garis (*line Organization*) seperti pada gambar IV.1.



Sumber: struktur organisasi RSUD Tembilahan

Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan terbagi menjadi beberapa bagian, dimana setiap bagian tersebut mempunyai *job destination*. Adapun job deskripsi pada rumah sakit umum daerah tembilahan

1. DIREKTUR
 - a. Menentukan dan memutuskan kebijakan perusahaan.
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan.
 - c. Mendelegasikan kepada direktur mengenai pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang direksi serta manajer.
 - d. Mendapatkan informasi kinerja perusahaan secara lengkap, teratur dan tepat waktu.
2. KABAG TATA USAHA
 - a. Bertanggung jawab atas kelancaran ketata usahaan
 - b. Mengatur dan melaksanakan administrasi dibidang perencanaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan .
 - c. Memberi hasil penilaian para karyawan
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
3. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 - a. Pelayanan umum administrasi kepegawaian.
 - b. Membuat laporan kepegawaian sesuai permintaan dinas.
 - c. Mengumpulkan data pegawai.
 - d. Membuat SK pembagian tugas karyawan

e. Membuat analisa kebutuhan karyawan

4. KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

- a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan.
- b. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan peralatan kantor.
- c. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan.
- d. Meninventarisasikan barang-barang/perlengkapan aset pemerintah
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kabag tata usaha

5. KASUBAG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

- a. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian kegiatan RSUD

6. KEPALA BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN

- a. Membantu direktur rumah sakit dalam pelaksanaan tugasnya
- b. Menyusun laporan anggaran dan program kerja bidang
- c. Mengendalikan penyusunan falsafah keperawatan
- d. Mengendalikan penyusunan kebutuhan tenaga keperawatan rumah sakit
- e. mengendalikan pengembangan unit pelayanan keperawatan
- f. Mengendalikan program peningkatan kesejahteraan tenaga keperawatan
- g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas ke direktur

7. KASI PELAYANAN KEPERAWATAN

- a. Menyiapkan tenaga pelayanan keperawatan dan pengembangan tenaga perawat dirawat inap dan rawat jalan
 - b. Menyiapkan logistic perawatan dirawat inap dan rawat jalan
 - c. Menyusun program kerja dan anggaran sasi pelayanan keperawatan
 - d. Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pelayanan keperawatan
 - e. Melaksanakan pembinaan, pengawakan dan penilaian terhadap pelayanan sesuai bidang tugasnya
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
8. KASI ETIKAN DAN MUTU KEPERAWATAN
- a. Menyusun rancangan pengembangan mutu asuhan keperawatan sesuai dengan kebutuhan
 - b. Menyiapkan rencana pemberian asuhan keperawatan sesuai dengan pola dan jenis pelayanannya
 - c. Melaksanakan program upaya peningkatan mutu asuhan keperawatan, koordinasi dengan komite keperawatan/komite medic rumah sakit
 - d. Melaksanakan koordinasi pengembangan pelayanan keperawatan secara menyeluruh

- e. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan standar keperawatan dan standar operasional keperawatan
- f. Memberikan bimbingan asuhan dan pelayanan keperawatan kepada perawat
- g. Melaksanakan koordinasi pengembangan pelayanan keperawatan
- h. Menyusun rencanan dan program kerja serta pelaporan dibidangn etika dan mutu kperawatan
- i. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja tenaga keperawatan
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya

9. KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun Seksi Perencanaan Pelayanan Medik berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perencanaan Pelayanan Medik secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan
 - h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi Perencanaan Pelayanan Medik secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Perencanaan Pelayanan Medik berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
 - j. Melaksanakan kegiatan pada Seksi Perencanaan Pelayanan Medik;
10. KASI PELAYANAN DAN PENUNJANG NON MEDIS
- a. Melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasn, evaluasi dan pelaporan dalam pelayanan pemulasaran jenazah,kesehatan lingkungan, laundry, pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan sarana dan prasaranan rumah sakit serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.1.2. Aktivitas Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, Rumah Sakit Umm Daerah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir bergerak dibidang layanan kesehatan masyarakat, dengan melayani masyarakat yang sedang sakit, namun dengan biaya yang dibantu oleh pemerintah daerah.

4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Setelah menjelaskan analisis penerapan akuntansi pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis menjelaskan hasil penelitian terkait analisis penerapan akuntansi pada Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Dari penelitian tersebut ditemukan kesalahan terhadap penerapan akuntansi sebagai berikut.

4.2.1. Dasar pencatatan

Dalam pencatatannya Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan basic akrual dalam penyusunan dan penyajian neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran. Dimana melakukan nya dengan menyandingkan pendapatan dan biaya pada periode disaat terjadinya

4.2.2. Proses Akuntansi

Proses pencatatan akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan memiliki beberapa tahap proses akuntansinya, transaksi, jurnal, posting ke buku besar, membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian,

- a. Tahap Pencatatan

Proses pencatatan dilakukan oleh bagiannya masing-masing, misalnya seperti bagian obat-obatan, setiap transaksi dicatatnya lalu diserahkan ke bendahara RSUD, lalu bendahara RSUD mencatat transaksi tersebut ke buku jurnal umum. Proses pencatatan yang dilakukan pihak RSUD sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

b. Posting Buku Besar

Sesi ini dicoba sehabis pencatatan setiap hari. Sesi rekapitan merupakan mengelompokkan catatan fakta transaksi ke dalam novel besar cocok dengan nama account serta saldo yang sudah dicatat ke dalam debit kredit. Pihak RSUD tidak membuat buku besar, yang mana novel besar ialah salah satu tahapan akuntansi. dengan ini pihak RSUD belum mempraktikkan standar akuntansi yang berlaku umum. Yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan sebagai berikut:

Tabel 4.1
RUMAH SAKIT MUM DAERAH TEMBILAHAN
BUKU BESAR
PER 31 DESEMBER 2017

Nama Akun: Kas

No Akun: 001

No	Tanggal	Ket	Ref	Debit	Kredit	Debit	Kredit
1.	2/2/2018			70.355.000		70.355.000	
2.	1/1/2018				4.251.543	66.103.457	

Sumber data: data olahan penulis 2020

c. Neraca Saldo

Di dalam sesi ini merupakan pembuatan neraca saldo oleh BLU, namun pihak RSUD tidak membuat neraca saldo bulanan maupun tahunan yang sepatutnya dicoba serta cocok dengan siklus akuntansi. Neraca saldo disusun buat membenarkan kalau buku besar secara sistematis lumayan akurat, ataupun dalam artian jumlah saldo-saldo debit sama dengan umlah saldo kredit. yang seharusnya dibuat oleh pihak RSUD adalah sebagai berikut:

TABEL 4.2
RUMAH SAKIT MUM DAERAH TEMBILAHAN
NERACA SALDO
PER 31 DESEMBER 2017

NO	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	Kas diendahara penerimaan	XXX	
2	Kas dibendahara pengeluaran	XXX	
3	Persediaan	XXX	
4	R/K PPKD		XXX
	JUMLAH	XXX	XXX

sumber: erlina,rambe,dkk

d. Jurnal Penyesuaian

Secara umum, manfaat jurnal penyesuaian yaitu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode, serta menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Sementara itu pihak RSUD belum melakukan penyesuaian pada akun bpp dan persediaan barang yang telah expired, pencatatan in harus disesuaikan dan dicatat dengan jurnal penyesuain yang berimplikasi kepada turunnya nilai persediaan dan naiknya biaya bpp. Pencatatan yang harusnya dilakukan pihak RSUD ialah:

Beban Pokok Penjualan XXX

Persediaan XXX

e. Jurnal Penyusutan

Melalui sesi wawancara pada pihak RSUD Tembilahan, metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus.yang dilakukan pihak RSUD sudah sesuai dengan standar pemendagri nomr 64 tahun 2013.

f. Tahap Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data yang dipakai dalam pembuatan laporan keuangan berasal dari pengumpulan data-data seperti piutang dan beban yang harus dibayar, laporan keuangan daerah meliputi laporan realisasi anggaran,laporan perubahan SAL,neraca,;aporan operasial,laporan arus kas,laporan perubahan ekuitas,catatan atas laporan keuangan,

g. Tahap Penyajian Laporan Keuangan

Menurut pemendagri nomor 64 tahun 2013 laporan keuangan daerah terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber,alokasi,dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pihak RSUD yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Terdiri dari pendapatan,belanja,transfer,dan pembiayaan.

Dalam penyajian laporan realisasi anggaran yang dilakukan pihak RSUD Tembilahan, secara keseluruhan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan daerah yang berlaku.

2) Laporan Perubahan SAL

Menurut konseptual PP No.71 tahun 2010 dikatakan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam pencatatannya, pihak RSUD tidak membuat laporan perubahan SAL yang mana merupakan salah satu tahap pelaporan keuangan daerah.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu pelaporan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam pelaporan neraca, terdapat aset lancar dan non lancar, kewajiban jangka panjang dan jangka pendek,

A. aset lancar

Aset lancar disebut sebagai lancar jika barang yang dimiliki umur manfaat kurang dari 12 tahun, aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, beban dibayar dimuka, dan persediaan. Dalam pelaporannya, pihak RSUD sudah melakukan penerapan akuntansi yang berstandar umum, kecuali pada bagian persediaan. Berikut kesalahan pada persediaan.

a) Penentuan harga perolehan

Dalam menentukan harga perolehan persediaan, RSUD tembilahan menerapkan harga perolehan seluruh persediaan barang yang terdiri dari harga beli ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan hingga persediaan itu siap digunakan. Seperti biaya angkut, biaya penyimpanan, biaya pemasangan, dan biaya-biaya tersebut dicatat oleh pihak RSUD di laporan operasional.

b) Sistem pencatatan persediaan

Sistem pencatatan persediaan yang dilakukan pihak RSUD ialah sistem pencatatan system perpetual yaitu perhitungan persediaannya dilakukan setiap terjadi barang masuk atau barang keluar.namun berbeda dengan system pencatatan persediaan obat-obatan menggunakan sistem periodik dimana perusahaan mencatat persediaan diakhir periode.

Masalah yang terjadi ialah pada persediaan obat-obatan pihak RSUD tidak mencatat kerugian atas persediaan yang telah expired. pihak RSUD hanya menumpukkan barang yang telah expired ke gudang, dan setelah sekian periode barang tersebut dimusnahkan oleh pihak RSUD. Seharusnya pihak RSUD mencatat jurnal barang yang telah expired agar mengetahui berapa jumlah atas kerugian tersebut.

Selanjutnya kesalahan pencatatan yang dilakukan pihak RSUD tidak menaruh hpp pada setiap transaksi persediaan obat-obatan.pihak RSUD hanya menaruh jumlah keseluruhan harga obat-obatan dibuku jurnal harian yang telah dibeli dan menaruh nomor transaksi pada buku persediaan obat-obatan. Sebagai contoh berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

LAPORAN PERSEDIAAN DAN PEMAKAIAN OBAT-OBATAN BLUD

RSUD PURI HUSADA

BULAN DESEMBER 2018

NAMA OBAT- OBATAN	SATUAN	PERS.A WAL	DROP OBAT	PERSE DIAAN	PEMAKAI AN	PERS.A KHIR
Aafact 1000 IU	Box 1	2	0	2	0	2
Acarborse tab 100 mg	Box100	33	0	33	5	28
Acetylstei n 200 mg	Box 60	17	100	117	51	66

sumber:laporan persediaan RSUD tembilahan

Dengan demikian pihak rsud tidak dapat mengetahui kapan tanggal transaksi dan tidak mengetahui pendapatan perbulan dari penjualan obat-obatan tersebut.

4.2.2.1.1. Pelaporan Persediaan

pada laporan neraca RSUD Tembilahan diketahui bahwa nilai persediaan obat-obatan pada tahun 2018 senilai Rp.3.251.827.073,96 kesalahan pencatatan atau penilaian ini mengakibatkan perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang salah dan memiliki nilai yang tidak wajar. hal ini juga berdampak Rumah Sakit ini tidak dapat mengetahui kinerja usaha perusahaan tersebut.

B. Aset nonlancar

Aset nonlancar berisi aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan langsung atau tidak langsung untuk digunakan sebagai aktifitas Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan. Aset lancar diklasifikasikan menjadi aset investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Dari masing-masing kualifikasi aset nonlancar, pihak RSUD sudah menerapkan akuntansi yang berlaku umum, kecuali pada aset tetap yang akan saya bahas dibawah ini.

a) aset tetap yang sudah habis manfaat

Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir mencatat aset tetap sesuai dengan harga perolehannya dibuku aset tetap. biaya penyusutan aset tetap pada tahun 2017 sebesar Rp.42. 772.685.249,94 sementara untuk tahun 2018 sebesar Rp.52.523.448.002,32.

Permasalahan yang terjadi pada pencatatan aset tetap ini ialah pihak RSUD Tembilahan masih menyajikan aset yang sudah habis nilai manfaatnya pada daftar aset tetap. sedangkan dalam peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 220/PMK/05/2016 menjelaskan bahwa aset tersebut seharusnya dihapuskan dari daftar aset tetap.

4) Laporan Operasional

Menurut PP No.71 tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode tertentu. Laporan operasional terdiri dari pendapatan

LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Pencatatan yang dilakukan pihak RSUD Tembilahan sudah sesuai dengan prosedur pemendagri No.64 tahun 2013 .

5) Laporan Perubahan Ekuitas

Pelaporan selanjutnya yang dilakukan pihak RSUD Tembilahan ialah membuat laporan perubahan ekuitas, laporan ini dicatat sesuai dengan prosedur akuntansi yang berlaku umum.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Pencatatan yang dilakukan pihak RSUD Tembilahan sudah sesuai standar akuntansi yang berlaku umum.

7) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas meliputi penerimaan kas dan pengeluaran kas, dimana jumlah seluruh penerimaan kas dan pengeluaran kas dimasukkan ke dalam satu laporan yaitu laporan arus kas. Pelaporan yang dilakukan oleh pihak RSUD Tembilahan sudah sesuai dengan standar yang berlaku umum.

8) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisitentang catatan atas laporan-laporan yang telah dibukukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan, Catatan ini juga mencakup tentang informasi kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan. Melalui sesi wawancara dengan pihak RSUD Tembilahan, dikatakan bahwa pihak RSUD Membuat laporan ini, namun tidak dapat diberi informasi karna bersifat privat.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, berikut ini merupakan kesimpulan dan saran yang telah dibuat oleh penulis.

5.1. Kesimpulan

- a. Perusahaan tidak membuat laporan perubahan SAL.
- b. Dalam mencatat aset tetap yang terdapat dibuku aset tetap, rumah sakit umum daerah tembilahan masih memasukkan aset yang telah rusak dibuku pencatatannya.
- c. Dalam buku persediaan obat-obatan, rumah sakit umum daerah tidak mencantumkan harga barang perunit nya
- d. RSUD tidak mencatat kerugian atas barang yang telah expired

5.2. Saran

- a. Seharusnya perusahaa membuat laporan perubahan SAL
- b. Sebaiknya perusahaan menghapus aset yang telah rusak dari buku aset tetap
- c. Sebaiknya RSUD tembilahan mencatat harga perunit dari obat yang telah terjadi transaksi
- d. Seharusnya RSUD Tembilahan mencatat kerugian atas barang yang telah expired

DAFTAR PUSTAKA

Kusufi Muhammad Syam, 2012, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Empat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Agoes, Sukrino. 2010, Akuntansi Perpajakan, Penerbit Erlangga, Jakarta

Muhammad Ihyaul Ulum, 2010, Akuntansi Sector Publik: Sebuah Pengantar, Malang, Umm Press

Halim, Abdul. 2012, Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerbit Alfabeta, Bandung

Tanjung, 2017, Akunansi Pemerintah Daerah Konsep Dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, Penerbit Alfabeta, Bandung

Andri Rahdinata, 2017, Analisis Penerapan Akuntansi Pada RSUD Indragiri Hulu, Universitas Islam Riau

Chairul Tanjung, 2017, Analisis Penerapan Akuntansi Pada Rumah Sakit Swasta Pekanbaru, Universitas Islam Riau

Gede, Muhammad, 2010, Akuntansi Pemerintah, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/ PMK.05/ 2016
Tentang Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 64 Tahun 2013 Tentang Siklus Pencatatan

Akuntansi Keuangan Daerah



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau